

**Respon ASEAN Terhadap Mundurnya India Dari Kerja Sama *Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP)***

**Raden Maisa Yudono**

Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, UPN Veteran Jakarta

Email: raden.maisa@upnvj.ac.id

**Wiwiek Rukmi Dwi Astuti**

Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, UPN Veteran Jakarta

**M. Chairil Akbar Setiawan**

Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, UPN Veteran Jakarta

***Abstract***

*Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) is a cooperation framework formulated by ASEAN and 6 strategic partner countries and is the first proposal in ASEAN history to discuss comprehensive economic cooperation. RCEP is ASEAN's effort to strengthen its position as regional aktor in the Southeast Asian. RCEP negotiations underwent changes during India's decision to withdraw from the RCEP negotiations, which prompted ASEAN to respond to these developments. This study fokuses on response taken by ASEAN to India's decision to withdraw from the RCEP negotiations. The concept used is soft regionalism which emphasizes geographic proximity, historical relations and the comparative advantage of the region. Soft regionalism is driven by not only by economic and business interests, but also market interests that become the energy of soft regionalism in Asia. This concept is functioning well because it conforms to the pragmatic Asian political conditions. The findings of this study is that ASEAN cannot be separated from the concept of soft regionalism in which it has been running, and still sees all changes through static point of view. ASEAN needs to make new breakthroughs in realizing comprehensive cooperation in the region.*

*Keywords: RCEP, ASEAN, India, Soft Regionalism*

**Abstrak**

*Regional Comprehensive Economic Partnership* (RCEP) merupakan kerangka kerja sama yang dirumuskan oleh ASEAN beserta 6 negara mitra strateginya dan merupakan proposal pertama dalam sejarah ASEAN yang membahas kerja sama ekonomi secara komprehensif. RCEP merupakan langkah ASEAN untuk mempertegas posisinya sebagai aktor utama di kawasan Asia Tenggara. Perundingan RCEP mengalami perubahan saat keputusan India untuk mundur dari perundingan RCEP, yang mendorong ASEAN merespon perkembangan tersebut. Kajian ini memfokuskan pada respon yang diambil oleh ASEAN atas keputusan mundur oleh India dari perundingan RCEP. Konsep yang digunakan adalah *soft regionalism* yang menekankan pada kedekatan geografi, hubungan sejarah serta keuntungan komparatif wilayah tersebut. *Soft regionalism* didorong oleh kepentingan ekonomi dan bisnis, serta kepentingan pasar yang menjadi energi *soft regionalism* di Asia. Konsep ini berfungsi secara baik dikarenakan sesuai dengan kondisi politik Asia yang pragmatis. Temuan dari kajian ini adalah ASEAN belum bisa lepas dari konsep *soft regionalism* dalam yang selama ini berjalan, dan masih melihat dalam sudut pandang yang statis dan ASEAN perlu membuat terobosan baru dalam mewujudkan kerja sama yang komprehensif di kawasan.

Kata kunci: *RCEP, ASEAN, India, Soft Regionalism*

## **Pendahuluan**

Seperti yang telah menjadi perdebatan maupun diskusi, proses integrasi regional baik secara institusi maupun kerja sama ekonomi dan politik di kawasan Asia belum mencapai tahap kohesi yang kuat. Katzenstein berargumen bahwa regionalism di Asia memiliki karakter yang terpengaruhi oleh perkembangan dalam kegiatan ekonomi pasar daripada dimensi normative yakni adanya institusi regional yang kuat (Oba, 2019: 128). Sehingga semua project yang menginisiasikan regionalisme di Asia akan bersifat “*soft regionalism*” dibandingkan “*hard regionalism*” yang dilakukan oleh Uni Eropa. Belum kuatnya norma hukum internasional dalam institusi regional kawasan dan masih elitnya topik integrasi regional menjadi penghambat yang kerap kali mengganjal.

Dalam sejarah ASEAN pun timbul begitu macam mekanisme kerja sama regional seperti *ASEAN +3*, *ASEAN + 1*, *East Asia Summit* dan yang terbaru adalah *Regional Comprehensive Economic Partnership*. Ide terbentuknya RCEP pertama kali dikemukakan pada KTT ASEAN pada November 2011 di Bali dan setahun kemudian dalam KTT ASEAN di Phnom Penh, November 2012, RCEP secara resmi diluncurkan serta dimulainya putaran negoisasi antara ASEAN dan 6

negara mitranya. Sepuluh negara anggota ASEAN melaksanakan negoisasi *Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP)* bersama dengan negara mitra ASEAN yakni Tiongkok, Jepang, Korea Selatan, Australia, Selandia Baru dan India pada tahun 2014 (Hsu, 2013).

Proposal RCEP merupakan proposal pertama dalam sejarah ASEAN yang membahas kerja sama ekonomi secara komprehensif. Kehadiran RCEP dalam berbagai diskusi memandang bahwa RCEP merupakan langkah ASEAN untuk menandingi kehadiran Trans-Pasific Partnership (TPP) yang diinisiasikan oleh Amerika Serikat melalui kebijakan Presiden Obama yakni “*Pivot to Asia*” yang meningkatkan kehadiran AS di kawasan Asia (Hsu, 2013). Tujuan dari pembentukan dari RCEP adalah memperluas cakupan dan memperdalam derajat kerja sama antara ASEAN dan mitra perekonomiannya dalam suatu bentuk *Free Trade Agreement (FTA)*.

YuJane Chen tahun 2016 berpendapat RCEP merupakan alternative kerja sama selain TPP, dalam negoisasi dan perumusan peraturan RCEP lebih mudah untuk diikuti terutama oleh negara-negara ekonomi menengah atau berkembang. Walaupun lebih mudah dan sederhana, dalam aspek liberalisasi perdagangan tetap bertujuan untuk

menjamin keterbukaan, daya saing dan pertumbuhan ekonomi pasar bagi negara yang berpartisipasi. RCEP juga memiliki misi yakni mempertahankan ASEAN Centrality dalam proses integrasi regional (Chen, 2016: 149).

Para pemimpin ASEAN memiliki tiga agenda utama dalam pembentukan RCEP yakni (1) Membentuk Digital ASEAN; (2) “Kemitraan” dalam ASEAN dan Mitra Dialog dengan memperkuat *ASEAN-centered regional architecture*; (3) Membangun keberlanjutan di semua dimensi. Visi Masyarakat ASEAN 2025 menjadi kekuatan pendorong dalam memperkuat kerja sama berkelanjutan (Ganapathi, Vol. 14, No. 3, July–September 2019).

Namun, motif politik juga muncul dalam perdebatan dan proses negoisasi RCEP, bahwa negara anggota ASEAN berkepentingan untuk membuat solusi atas buntunya proses integrasi ekonomi kawasan Asia Tenggara sejak terjadinya krisis 2008. Perkembangan negoisasi RCEP antara ASEAN dan 6 negara mitranya tidak berjalan mulus, perubahan lanskap politik domestic dan pertimbangan ekonomi masing-masing negara berimplikasi proses negoisasi RCEP baru terlihat hasilnya pada tahun 2015 (Hsu, 2013:42). Menurut Wardani Pembentukan dari proyek mega-regional

FTA menjadi agenda penting bagi negara-negara utama. Terutama dalam pembentukan RCEP, dimana kepentingan negara anggota ASEAN dan mitra ASEAN seperti Tiongkok, India dan Jepang juga memiliki kepentingan besar untuk integrasi ekonomi dan perdagangan (Wardani, *India’s Readiness for the Regional Comprehensive Economic Partnership*, Vol. 6, Iss. 2, Pgs. 15, 2020).

Dimensi ekonomi-politik regional pun melatarbelakangi kehadiran RCEP sebagai salah satu inisiatif terbaru ASEAN. terutama dalam konteks ekonomi, tidak lepas dari potensi yang akan dihasilkan jika RCEP resmi disetujui yakni FTA pertama di dunia yang melibatkan Tiongkok dan India. Berbeda dengan TPP yang mengedepankan penyesuaian peraturan maupun institusi, RCEP memberikan keleluasaan bagi negara yang meratifikasi dalam menentukan derajat liberalisasi perekonomian mereka dan RCEP memberikan *Special and Differential (S&D)* bagi negara-negara yang dinilai masih perlu waktu untuk menerapkan secara penuh perjanjian RCEP (Hsu, 2013: 42-43). Perbedaan ini berasal dari kondisi dan tantangan yang berasal dari ASEAN yakni masih besarnya kesenjangan dalam bidang infrastruktur dan pembangunan. Lebih lanjut bisa dilihat dalam table di

bawah berdasarkan studi yang dilakukan oleh Kristy Hsu pada tahun 2013:

**Tabel 1. Perbandingan TPP dan RCEP**

	<b>TPP (P11)</b>	<b>RCEP</b>	<b>Comparison</b>
<b>Participants (potential participants)</b>	Singapore, Brunei, Chile, Peru, New Zealand, Malaysia, Vietnam, Australia, Canada, Mexico	Ten ASEAN member states, China, Japan, Korea, India, Australia, New Zealand	Not all ASEAN Member States are TPP members
<b>GDP (% global share)</b>	29.65 (2011)	28.51 (2011)	The RCEP, if realised, will become the largest FTA in the world in terms of population covered
<b>Merchandise export/import (% global share)</b>	18.97%, 22.5% (2011)	28.1%, 27.2% (2011)	
<b>Issues Coverage</b>	Trade in goods, services, investment, trade facilitation, IPR, competition policy, state owned enterprises, government procurement, labour and environment	Trade in goods, services and investment, customs procedure, technical barriers, IPR, S&D treatment to less developed ASEAN member states	The RCEP will not include issues such as labour and environment, but will include S&D treatment to less developed CLMV countries.
<b>Negotiation approach</b>	Single undertaking	Single undertaking early harvest, sequential liberalisation or other agreed modalities.	The RCEP provides more flexibility
<b>Progress</b>	To be concluded in 2013	To be concluded by the end of 2015	The RCEP, based on ASEAN+One FTA, may take less time for negotiation.
<b>Response from major countries</b>	Japan is interested; China and Korea have not expressed interest yet.	All six FTA partner countries expressed interest and support	China will join the RCEP to counter balance the US-led TPP, India will also join the RCEP, as TPP is not accessible to it.

Sumber: (Hsu, 2013)

Dari tabel yang dibuat oleh Hsu, terdapat hal menarik yakni setiap mitra ASEAN menyambut kerja sama RCEP, pemaparan Hsu tidak lepas dari prinsip pembentukan RCEP adalah mempertahankan ASEAN Centrality. Dalam konteks ekonomi negara anggota ASEAN sadar untuk mempertahankan posisi central ASEAN maka diperlukan upaya negara mitra mereka untuk bekerja sama melalui FTA yang memanfaatkan kehadiran ASEAN (Fukunaga, 2014: 104). ASEAN pun merangkai perannya sebagai fasilitator dari proses integrasi tersebut, hal ini berdasarkan pengalaman ASEAN yang mampu menyediakan forum dimana semua pihak yang berkompetisi mau hadir dan membahas solusi. Contoh yang dijadikan

rujukan ASEAN adalah ASEAN Economy Community yang memiliki berbagai macam skema kerja sama dari ASEAN +3, ASEAN +1, East Asian Summit dan lainnya.

Dalam setiap proyek integrasi kawasan dalam sejarah ekonomi politik internasional terdapat berbagai macam hambatan, salah satu hambatan yang kerap kali muncul ialah meningkatnya biaya transaksi yang diakibatkan oleh proses penyesuaian sistem maupun norma hukum, terjadinya instabilitas dan munculnya dampak bagi keutuhan rejim perdagangan. Namun tantangan utama adalah pertentangan politik antara negara-negara ekonomi besar yang mendukung insiatif proses integrasi yang dalam pandangan negara-negara lainnya hanya memberikan ruang kecil untuk bernafas (Hsu, 2013: 46). Berjalan atau buntutnya project RCEP ini tidak lepas pula dari faktor mikro dan makro yang mempengaruhi proses pengambilan keputusan para negara partisipasi baik dari sisi politik domestic maupun ekonomi (Chen, 2016: 153).

Tantangan negoisasi RCEP tidak hanya dalam substansi dalam juga terdapat dalam keterwakilan dalam sidang-sidang negoisasi. Pada pertemuan pertama *Trade Negotiation Committee (TNC)* terjadi perdebatan akan siapa yang menjadi ketua dalam komite tersebut. ASEAN

menginginkan bahwa ketua komite berasal dari ASEAN sementara negara mitra ASEAN menginginkan ketua bersama yang salah satunya berasal dari negara mitra ASEAN. Pada akhirnya semua negara setuju bahwa yang menjadi ketua komite berasal dari ASEAN tanpa ada jabatan ketua bersama (Fukunaga, 2014: 105). Perdebatan ini memperlihatkan bahwa negoisasi RCEP tidak semudah yang proses negoisasi terdahulu.

Tantangan lain adalah apakah ASEAN bisa menjadi “*driver of substance*” dalam negoisasi RCEP. ASEAN bisa memilih untuk tetap sebagai fasilitator saja dan mengikuti arah perdebatan yang ada atau ikut peran aktif dalam agenda setting dan substansi FTA. Keduanya memiliki keuntungan dan kelebihan, dengan implikasi yang sama yakni apapun hasilnya akan memberikan dampak bagi negara anggota ASEAN yakni mereka bisa menempatkan diri sebagai pemain dalam intergrasi regional atau sebaliknya mereka akan tertinggal dikarenakan kesenjangan antara negara partisipasi RCEP.

### **Hubungan India dan ASEAN**

Hubungan India dan ASEAN telah dimulai sejak India mengadopsi kebijakan “*Look East*” pada decade 90-an. Pada tahun 1992, India dan ASEAN membentuk

*sectoral dialogue partnership* yang pertama dan kemudian pada tahun 1995 meningkat menjadi full dialogue partnership, dan pada tahun 2012 pun menandakan 20 tahun hubungan mitra antara India dan ASEAN. Namun walaupun menjadi mitra strategis selama 28 tahun, hubungan perdagangan India dan ASEAN masih rendah dibandingkan +3 yakni Tiongkok, Jepang dan Korea Selatan. Bahkan sebelum tahun 2012, India hanya mencatat nilai perdagangan dengan ASEAN senilai US\$ 68.4 milyar di tahun 2011 atau 2,9% dari total perdagangan ASEAN, dibandingkan Tiongkok (11,7%), Jepang (11,4%) dan Korea Selatan (5,2%) (Hsu, 2013).

Tentunya dengan status sebagai mitra strategis ASEAN, banyak pihak berharap kepada India untuk memainkan peran lebih dalam kerja sama dengan ASEAN, Sebagai mitra strategis ASEAN, India aktif dalam berbagai kegiatan ASEAN yang berhubungan dimensi pertahanan dan strategis, yang antara lain adalah *The East Asia Summit, the ASEAN Regional Forum (ARF), the ASEAN Defence Ministers Meeting Plus (ADDM+)* dan *ASEAN Maritime Forum*. Begitu pula dengan kerja sama pertahanan dengan negara anggota ASEAN secara bilateral. Pendorong bagi India untuk aktif bekerja sama dalam dimensi pertahanan

dengan negara anggota ASEAN adalah tantangan utama yang sama dalam memerangi terrorism, perompakan, pencucian uang, *organized crime*, *drug trafficking*, penjualan senjata gelap, *human trafficking*, *cybercrime* dan lain-lain. Sehingga kerja sama ASEAN – India lebih memfokuskan penanganan isu-isu keamanan regional di kawasan Asia Selatan dan Asia Tenggara. Hal ini memperlihatkan bahwa topik utama yang merangkai kerja sama India dan ASEAN adalah dimensi politik dan keamanan (Ganapathi, Vol. 14, No. 3, July–September 2019).

Tercetusnya ide mega-trade bloc dengan adanya skema RCEP memberikan angin segar bagi India - ASEAN. Akan tetapi pada KTT ASEAN Summit 4 November 2019 di Bangkok, Thailand, India memutuskan untuk mundur dari proses negoisasi RCEP setelah melalui 29 putaran negoisasi semenjak dimulainya negoisasi pada tahun 2012-2013. Banyak spekulasi yang muncul atas keputusan India, Amitendu Palit berpendapat bahwa mundunya India dari RCEP tidak lepas dari desakan politik domestik yang menekan Perdana Menteri Modi (Palit, 2019). Pembahasan RCEP memang tidak populer di kalangan ekonomi maupun politik India, RCEP dalam perspektif pelaku ekonomi India merupakan FTA

India dengan Tiongkok dibandingkan dengan ASEAN. Kekhawatiran India berdasarkan pula oleh adanya defisit perdagangan yang dialami oleh India pada tahun 2018 yakni mencapai US\$ 53.6 milyar dari total perdagangan yakni US\$ 87.1 milyar. Salah satu alasan lain adalah India belum mampu mengembangkan industri manufakturnya yang memproduksi barang setengah jadi maupun jadi (Palit, 2019).

Keputusan India berakibat pada proses negoisasi RCEP yang telah berjalan, yang menarik ialah situasi dan kondisi ini bagi ASEAN merupakan situasi yang jarang terjadi, dikarenakan ASEAN memiliki kemampuan untuk meyakinkan mitranya untuk tetap berada dalam proses negoisasi. ASEAN pun harus memberikan keputusan-keputusan yang mencegah hal serupa terjadi di masa depan.

Berdasarkan pemaparan perkembangan RCEP sampai dengan keputusan India mundur dari proses negosiasinya, maka tulisan ini menganalisis bagaimana respon ASEAN terhadap mundurnya India dari RCEP. Selain itu, tulisan ini juga akan melihat faktor-faktor yang menjadi pertimbangan ASEAN mengeluarkan respon tersebut.



### **Kajian Pustaka**

Studi YuJane Chen tahun 2016 yang membahas perkembangan kerja sama regional di Asia-Pasific berkesimpulan bahwa belum ada solusi yang tepat dalam mempersatukan kepentingan untuk melakukan integrasi regional dan global dengan kepentingan mempertahankan identitas nasional, belum adanya solusi komprehensif yang bisa menyelesaikan perdebatan tersebut. Chen menambahkan tidak adanya jawaban tetap aatau yang menyelesaikan semua hambatan dikarenakan dinamisnya dimensi ekonomi serta upaya untuk membentuk suatu ruang tersendiri bagi identitas nasional merupakan upaya yang tidak mudah. Chen juga melihat bahwa integrasi regional maupun global juga tidak akan menghapus seluruh mekanisme perlindungan yang ada atau menghilangkan pentingnya suatu ekonomi nasional (Chen, 2016: 169).

Sebelum Chen, Yoshifumi Fukunaga di tahun 2016 membahas perkembangan proses integrasi regional ASEAN terutama proses negoisasi RCEP, dari hasil penelitiannya adalah ASEAN Centrality masih menjadi alasan utama RCEP dibentuk namun dia menyatakan pula bahwa alasan tersebut tidak lah cukup menempatkan posisi ASEAN sebagai pusat intergrasi regional. Menurutnya ASEAN harus memainkan peran lebih

aktif dalam negoisasi RCEP dan mulai menempatkan sebagai “driver of substance” serta membangun solidaritas lebih kuat terutama dalam proses negoisasi FTA (Fukunaga, 2014: 113. Selain mempertahankan ASEAN Centrality, ASEAN juga menerapkan konsep ”balancing of power” dan” institutional hedging of state actor” seperti yang diungkapkan oleh Mie Oba dalam tulisannya (Oba, 2019 : 137). Strategi ini dilakukan oleh sebagai respon terhadap kondisi politik regional yang tidak menentu dan saat bersamaan berusaha memperkuat hubungan ekonomi intra/inter kawasan.

Oba juga menegaskan faktor perilaku dan keputusan para negara-negara *small & middle power* merupakan hal yang harus diperhatikan. Dalam sejarah ASEAN dari organisasi yang bersifat ceremonial menjadi suatu organisasi saat ini tidak lepas dari tarik ulur antara negara kuat di ASEAN dengan negara *small & middle power* di ASEAN.

### ***Soft Regionalism***

Dalam penelitian, konsep yang akan digunakan adalah *soft regionalism* yang diambil dari tulisan Suisheng Zhao tahun 2013. Menurut Zhao konsep soft regionalism erat kaitannya dengan kedekatan geografi, hubungan sejarah serta



keuntungan komparatif wilayah tersebut. *Soft regionalism* didorong oleh kepentingan ekonomi dan bisnis, sesuatu yang berlainan dengan kerja sama regional di Eropa (Zhao, 2013: 151). Tidak hanya kepentingan ekonomi namun juga kepentingan pasar yang menjadi energi *soft regionalism* di Asia. Konsep ini menjadi berfungsi secara baik dikarenakan sesuai dengan kondisi politik Asia yang pragmatis, dikarenakan tidak perlunya keberadaan perjanjian internasional yang mengatur proses integrasi regional secara kuat. Zhao menambahkan hal ini mengamankan isu kedaulatan yang sensitif di kawasan Asia.

Hubungan saling ketergantungan (*interdependence*) dalam ekonomi menjadi solusi dalam meningkatkan derajat kerja sama regional. Dalam konteks Asia Pasific, *interdependence* ekonomi tidak harus mengesampingkan kedaulatan bahkan sebaliknya kedaulatan suatu negara masih menjadi pertimbangan utama dalam membangun kerja sama regional di Asia. Sehingga konsep *soft regionalism* merupakan konsep yang kami telaah dan bisa menjawab situasi mundurnya India dari RCEP.

### **Neoliberalism**

Pendekatan Neoliberalisme dianggap sebagai kritik paling tajam atas teori

Realisme dan Neorealisme. Gagasan ini dapat dilacak korelasinya dengan teori Integrasi Fungsional yang berkembang pada decade 1940 dan 1950 beserta studi tentang Integrasi pada 1960-an. Mitrany (1948) menyatakan bahwa kerjasama antar negara pada awalnya dilakukan pada sejumlah hal teknis yang umum tapi lambat laun relasi tersebut dapat menyebar ke aspek lain dimana keuntungan mutual data tercapai. Kooperasi antar negara mewujudkan baik secara regional maupun melalui institusi internasional. Keohane dan Nye meyakini keanggotaan via institusi internasional dapat memperluas secara signifikan konsep kepentingan nasional yang selama ini ditafsirkan secara sempit dan tertutup. Kepatuhan terhadap norma dan aturan dalam institusi internasional dapat mereduksi daya tarik atau ikatan kedaulatan yang sangat kaku (Keohane & Nye, 1977).

Secara umum kedua gagasan tersebut memandang bahwa jalan menuju perdamaian dan kesejahteraan adalah ketika negara rela “menyerahkan” sebagian kedaulatan dan sumber dayanya untuk menciptakan komunitas yang terintegrasi agar dapat merespon masalah-masalah di kawasan yang sama. Interdependensi kompleks (*complex interdependence*) menurut Keohane dan Nye adalah konsep yang muncul untuk

menjelaskan fenomena dengan karakteristik relasi yang lebih cair dan multidimensional (Baylis and Smith, 2014). Adapun 4 ciri dunia menurut konsep ini adalah sebagai berikut:

1. Semakin terhubungnya interaksi antara negara dengan aktor non-negara. Neoliberalisme Institusionalis meyakini bahwa dinamika hubungan internasional telah berubah cukup signifikan. Dunia menjadi lebih pluralistic dalam hal aktor-aktor yang terlibat dan dalam interaksinya;
2. Agenda politik internasional baru yang tak lagi membedakan antar high politics dan low politics;
3. Pengakuan atas adanya banyak saluran atau cara interaksi bagi aktor-aktor yang melampaui batas negara'
4. Penurunan tren dan keutamaan penggunaan kekuatan militer sebagai strategi tindakan politik negara. pada konteks ini, fenomena globalisasi dianggap paling cocok merepresentasikan interkoneksi dunia yang semakin massif. (Keohane & Nye :1987)

Para pemikir Neoliberal memahami institusi sebagai mediator dan alat untuk mencapai kerjasama diantara aktor dalam sistem internasional. Dengan begitu, mereka menaruh perhatian besar pada tata

kelola pemerintahan global yang lebih terarah dan rapi. Meski sangat kental dengan nuansa dan isu ekonomi, Neoliberalisme berupaya melampaui isu-isu seputar pembangunan dan perdagangan. Terjadi perluasan isu-isu baru seperti ancaman terorisme global atau proliferasi senjata nuklir. Agenda keamanan menjadi fokus baru yang menjadikan Neoliberalisme cukup berbeda dengan Liberalisme internasional atau klasik.

Negara-negara perlu mendorong kerjasama yang lebih intensif dan luas. Ancaman-ancaman keamanan nasional dapat datang seperti dari penjualan narkoba, pandemic HIV, perdagangan manusia, hingga kejahatan financial. Kesemuanya membutuhkan koordinasi dan penciptaan rezim internasional agar dapat merumuskan kebijakan yang tepat. Keohane berpendapat bahwa tragedi 11 September 2001 pada gilirannya melahirkan kebutuhan bersama untuk menumpas terorisme. Banyak negara dan institusi membentuk koalisi internasional dalam menjamin keamanan nasional dari serangan terror. Kerjasama multilateral inilah yang menjadi fokus utama gagasan Neoliberalisme. Bahkan negara adidaya seperti AS tidak dapat bertindak sendirian. Hubungan internasional mensyaratkan adanya aliansi dan konsolidasi yang lebih terbuka dan saling menguntungkan.

Neoliberalisme berbeda dari liberalism internasional sebagai upaya untuk menjelaskan hubungan internasional yang sangat dinamis. Pergeseran situasi wajib direspon dengan adaptasi konseptual dan praktisi. Termasuk, diantara adalah pengakuan pentingnya aktor negara yang dalam tradisi liberal lebih condong pada individu dan masyarakat. Pendekatan neoliberal percaya bahwa negara-negara dapat duduk bersama untuk memperjuangkan kepentingan nasional yang saling menguntungkan. Hubungan internasional dapat bersifat *positive sum game*.

Sejumlah asumsi dasar Neoliberalisme sebagai teori HI dapat diringkas sebagai berikut (Steans et al, 2010) :

1. Negara adalah aktor kunci dalam hubungan internasional, tapi bukan sebagai satu-satunya aktor signifikan. Negara bersifat rasional dan instrumental.
2. Negara berupaya memaksimalkan keuntungan dari proses kerjasama yang terjalin.
3. Hambatan terbesar kerjasama yang berhasil adalah tindakan tidak patuh dan curang dari negara-negara.
4. Kerjasama bukanlah hal ideal, akan tetapi negara secara sukarela dapat

merubah preferensi politik dan kebijakannya selama ada keuntungan pada pembentukan institusi bersama.

5. Globalisasi ekonomi dan politik adalah contoh konkret kekuatan teoritis Neoliberalisme.
6. Neoliberalisme berupaya mendorong maksimalisasi keuntungan bagi semua pihak yang terlibat dalam institusi.
7. Preferensi dan intensi negara lebih penting dibanding membangun kemampuan militer negara.
8. Neoliberalisme berupaya mendorong lahirnya rezim internasional yang lebih inklusif dan mempromosikan perdamaian lewat kerangka interdependensi.

### **Mundurnya India dari RCEP**

Penelitian ini menggunakan analisis kualitatif dari jurnal maupun pernyataan resmi pihak-pihak yang berkompeten dalam RCEP. Penelitian ini menemukan adanya dua faktor utama yang melatarbelakangi India mundur dari diskusi RCEP, yakni tekanan politik dalam negeri yakni besarnya tekanan dari berbagai bagian industri dan keputusan India adalah melindungi ekonomi negaranya dari guncangan eksternal yang akan muncul. Sektor pertambangan,

elektronika serta tekstil dan garmen merupakan tiga sektor penting dalam negosiasi RCEP. Mundurnya India dari RCEP salah satunya disebabkan oleh kuatnya penolakan dari asosiasi garmen India, yaitu *Clothing Manufacturers Association of India* (CMAI). CMAI menyatakan bahwa RCEP bagaikan pedang bermata dua yang hanya akan menguntungkan beberapa industri, sementara yang lain hanya akan mengalami kerugian.

Penolakan dari masyarakat India juga berdasarkan kondisi komoditi atau produk yang dihasilkan oleh India. Produk yang menjadi andalan India bertumpu pada sektor pertambangan yakni minyak bumi dan produk turunannya, sektor industri elektronik dan tekstil, ini berdasarkan data Kementerian Perdagangan India tahun 2019 dimana peringkat 1–10 yakni (1) *Mineral fuels* dan *Mineral Oils*; (2) Permata dan perhiasan; (3) Mesin dan suku cadang pabrik; (4) Bahan kimia; (5) Kendaraan bermotor; (6) Obat-obatan; (7) Barang elektronik dan suku cadangnya; (8) Besi dan Baja; (9) Bahan tekstil tidak dijahit dan (10) Bahan tekstil jadi / sudah dijahit(<https://tradestat.commerce.gov.in/ei/db/Icntcom.asp>).

Dari data tersebut memperlihatkan bahwa sektor industri yang berkembang di India adalah industri yang mengandalkan

sumber daya alam dan jumlah tenaga kerja yang banyak, dimana salah satunya adalah industri tekstil India. Berdasarkan data Kementerian Perdagangan India, nilai ekspor-import India dan Tiongkok mengalami defisit bagi India senilai USD 48.647.990 dan jika diakumulasi dengan negara-negara dalam RCEP maka India memiliki defisit perdagangan senilai USD 105 miliar. Kekhawatiran India juga didukung pula oleh komoditi yang diimpor oleh India dari Tiongkok, yakni komoditi yang berupa produk-produk serupa dengan produk yang menjadi andalan India di pasar internasional. India mengimpor produk seperti barang elektronik dan suku cadangnya, mesin dan suku cadang pabrik, bahan kimia, produk plastic, alat-alat medis, kendaraan bermotor, besi dan baja dan aluminium. Persamaan ini memberikan implikasi terjadinya persaingan antara sektor industri India dan Tiongkok dalam memenuhi kebutuhan pasar. Terlihat tanpa pemberlakuan RCEP, India menghadapi persaingan ketat dengan negara anggota ASEAN dan Tiongkok sehingga India perlu mengatur ulang posisinya dalam negosiasi RCEP.

Faktor berikutnya adalah India juga perlu menyusun strategi yang matang agar kerja sama dengan ASEAN memberikan *leverange* bagi perekonomiannya. Strategi tersebut diperlukan karena ASEAN

memiliki berbagai macam mekanisme bekerja sama dengan negara mitra strategisnya. Kajian Mueller tahun 2019 menemukan bahwa terdapat 7 kerja sama utama ASEAN dengan mitra strateginya, seperti di bawah ini;

**Tabel 2. Inisiatif konektivitas kompetitif oleh mitra eksternal ASEAN**

Partner	Initiative	Budget	Type of Support
China	Belt and Road Initiative	No official budget	National project implementation, technical assistance
Japan	Partnership for Quality Infrastructure	\$ 200 billion	National project implementation, technical assistance
South Korea	ASEAN-Korea Infrastructure Fund (planned from 2022)	\$ 200 billion	National project implementation, technical assistance
EU	Connecting Europe and Asia	\$ 70 billion	National project implementation, technical assistance
US	International Development Finance Corporation	\$ 60 billion	National project implementation, technical assistance
India	Ad-hoc support	> \$ 1 billion	National project implementation
Australia	Australia-ASEAN Development Cooperation Programme Phase II (AADCP II)	\$ 39 million	Technical assistance
Germany	Ad-hoc support	< \$ 10 million	Technical assistance

Sumber: (Mueller, 2019)

Dari hasil kajian Mueller terlihat bahwa posisi India sebagai mitra strategis ASEAN mendapatkan saingan dari negara-negara lain. Dengan hanya bermodal US\$ 1 milyar untuk meningkatkan kerja samanya dengan ASEAN dan negara anggota ASEAN secara bilateral maka India akan sulit bersaing jika tidak memiliki strategi yang tepat. Saingan terberat India dalam hal ini adalah Tiongkok dan Jepang yang memiliki komitmen dalam proyek infrastruktur nasional maupun dukungan teknis.

Faktor berikutnya adalah India telah memiliki keuntungan dalam konsep *Science Diplomacy*, yang diidentifikasi

sebagai alat potensial untuk memperkuat dan meningkatkan hubungan antar negara serta globalisasi, dengan mengedepankan isu global, pertukaran informasi dan teknologi, science dan inovasi. *Science Diplomacy* juga memperkuat prinsip-prinsip keilmuan berdasar transparansi (Sharma & Varshney, Vol.1 No. 2 March 2019). Kebijakan luar negeri India pun memberikan perhatian khusus pada penerapan *Science* dan teknologi untuk mendukung peningkatan kerja sama internasional. *Science Diplomacy* yang dikembangkan oleh India meliputi kerja sama di tataran bilateral, regional and multilateral.

Saat ini India memiliki perjanjian bilateral dengan 83 negara dalam *Science* dan *Technology* dengan kerja sama aktif dengan 44 negara. Bahkan India telah memperkuat kerja sama tersebut dengan negara-negara maju seperti Australia, Perancis, Jerman, Israel, Jepang, Rusia, Korea Selatan, Inggris dan Amerika Serikat (Sharma & Varshney, Vol.1 No. 2 March 2019).

Ketiga faktor tersebut memperlihatkan bahwa mundurnya India bukan tanpa perhitungan yang matang, dan India tetap dalam posisi mundur tetapi tidak menolak hasil negoisasi RCEP.

### **Respon ASEAN**

Secara umum, ASEAN tidak menutup pintu terhadap peluang kembalinya India dalam RCEP. Kesepakatan dalam RCEP sendiri akan diratifikasi oleh 15 negara sekitar akhir 2020. Meskipun begitu, ASEAN masih meyakini bahwa keterlibatan India punya dampak penting bagi perluasan agenda Kerjasama ekonomi, politik, dan penguatan solidaritas Asia (Jakarta Post:2020). Keyakinan ini dengan alasan yang cukup kuat karena bagi ASEAN, India merupakan mitra dagang yang menguntungkan dengan ASEAN mencatat surplus USD 19.452.431.928 atas India. Kondisi ini terbalik dengan posisi ASEAN dengan Tiongkok. Dengan posisi yang menguntungkan bagi ASEAN maka keikutsertaan India di RCEP merupakan opsi yang tepat.

Keputusan India untuk mundur dari negosiasi RCEP merupakan adalah tantangan bagi visi besar RCEP sebagai salah satu proyek regional ekonomi paling ambisius di dunia. Dengan demikian, ASEAN tampak sangat hati-hati dengan respon diplomatiknya. Sejumlah upaya persuasive telah ditempuh untuk menarik kembali India namun sejauh ini masih gagal (Chongkittavorn: 2020). Respon ASEAN yang tergolong sangat moderat, bahkan pada derajat tertentu terbilang

permisif, dipengaruhi oleh dua faktor krusial.

Pertama, RCEP merupakan peluang terbaik ASEAN dalam mempromosikan perdagangan bebas di Asia secara menyeluruh. Selain mengusung semangat dan solidaritas Asia, RCEP memiliki potensi ekonomi yang luar biasa. Dengan atau tanpa India didalamnya, keuntungan ekonomi RCEP masih cukup fantastis. Jika India masih tergabung, estimasi nilai peningkatan GDP dapat mencapai 171 miliar dollar AS bagi RCEP.

Sementara itu, skenario tanpa India pun menjadi opsi yang terbuka juga dalam negosiasi RCEP, tanpa keikutsertaan India dalam RCEP maka diperkirakan nilai GDP-nya mencapai 137 miliar Dollar AS (Berger :2020). RCEP pun secara objektif semakin mengesakan representasi dari ceruk pasar terbesar di dunia dengan ASEAN beserta Tiongkok, Jepang, dan Korea Selatan yang merupakan motor industrilisasi dunia diluar Eropa dan Amerika Serikat. Ekonomi Indonesia yang potensial akan semakin membesar dan juga Australia dan Selandia Baru yang menjadi pemimpin ekonomi di Kawasan Oseania. RCEP dari potensi ekonomi dapat dikatakan sebagai Blok Perdagangan terbesar di dunia. Artinya, kehilangan India tidak akan menjadi masalah besar

bagi blok perdagangan sebesar RCEP. Berbeda dengan Tiongkok, benefit ekonomi ASEAN terhadap India jauh lebih kecil terutama pada volume perdagangan (Acharya:2013: 273). Posisi India pun dalam *Foreign Direct Investment* di kawasan ASEAN masih dibawah Tiongkok, dari tahun 2013—2019, India hanya mencatat FDI dengan total nilai USD 9.628.000 dibandingkan dengan Tiongkok diperiode sama yang mencapai USD 67.642.000 (<https://data.aseanstats.org/fdi-by-hosts-and-sources>). Hal tersebut menjadi tantangan yang tidak terlalu besar. Namun begitu, ASEAN bersama 5 negara anggota lain memiliki pandangan yang cenderung positif terhadap India.

Terlepas dari faktor politik dan kepentingan ekonomi domesticnya, secara diplomatic India adalah bagian penting dari lahirnya RCEP. Kontribusi dan peran India sedari awal adalah faktor yang tidak mungkin dilupakan begitu. Oleh karena itu, ruang negosiasi lanjutan antara India dengan 15 negara lain akan tetap ada. proposal paket baru perjanjian ke India sangat potensial akan terus dirundingkan oleh kedua belah pihak (Indiatimes: 2020). Dengan demikian, mundurnya India disikapi secara lebih cair. Respon konfrontatif dalam bentuk pemberlakuan sanksi tidak dilakukan. Dalam RCEP

peran ASEAN lebih kental sebagai mediator dan payung negosiasi negara-negara anggota.

Kedua, respon ASEAN sangat dipengaruhi oleh karakter ASEAN itu sendiri. ASEAN merupakan institusi regional dengan ciri yang relative egaliter dan cukup harmonis. Prinsip “ASEAN Way” menjadi pilar utama yang menopang kohesi blok Asia Tenggara selama puluhan tahun. Namun begitu, prinsip tersebut telah banyak menuai kritik, terutama pada implikasinya terhadap konstruksi regionalism yang lebih mendalam dan Institusionalisasi Kerjasama yang lebih mengikat. Pada kasus mundurnya India, ASEAN masih menunjukkan salah satu kelemahan terbesarnya yakni absennya Kepemimpinan structural dalam kerangka RCEP.

Paradigma ASEAN cenderung stagnan atau terpaku pada keutamaan nilai-nilai kultural Asia Tenggara sebagai identitas bersama dibanding sebagai institusi regional dengan mekanisme organisasi yang mengikat. Friksi dan konflik internal pada akhirnya tidak dikelola secara tegas. Keputusan India untuk keluar merupakan preseden buruk bagi implementasi RCEP yang membutuhkan soliditas para anggotanya. Tidak mustahil jika hal ini memicu reaksi berantai dimana negara anggota lain



mundur dari RCEP dengan alasan situasi domestic politik maupun ekonomi masing-masing.

Respon ASEAN terhadap mundurnya India dapat dijangkarkan pada analisa tentang model kepemimpinan ASEAN. Mueller (2019) membuat tipologi dan teorisasi tentang sentralitas kepemimpinan ASEAN kedalam 4 tipe, yaitu *Leader*, *Convener*, *Convenience*, dan *Necessity*. *Leader* bermakna ASEAN akan mendorong kepemimpinan intelektual untuk memperkuat legitimasi masing-masing anggota. *Convener* mengacu pada peran ASEAN untuk menyediakan wadah dan forum negosiasi yang netral. *Convenience* berarti ASEAN akan konsisten mendorong kepemimpinan formal yang membuka ruang otonomi dan sikap independent negara-negaranya. Sementara *Necessity* mewakili peran ASEAN yang wajib menyediakan kepemimpinan formal terhadap kekuatan-kekuatan eksternal dan pihak lain yang memiliki ketertarikan pada area pasar ASEAN yang semakin membesar.

Dalam konteks RCEP, sentralitas ASEAN terlihat lemah pada bagian *necessity*. Sejumlah kesepakatan atau klausul perjanjian RCEP sedari awal lebih banyak dikontrol oleh Jepang, Tiongkok, dan Korea Selatan (Mueller:2019). Sehingga, sentralitas kepemimpinan

ASEAN sangat dipertanyakan. Bahkan di arena lain seperti ASEAN Free Trade Area dan ASEAN Economic Community, masih gagal merumuskan komitmen perjanjian dagang yang lebih spesifik. Kepemimpinan ASEAN dalam RCEP lebih menonjolkan aspek *Convener*. ASEAN lebih fokus pada penyediaan forum dialog dan negosiasi dibanding sebagai pengambil keputusan yang sentralistik dan otoritatif.

Terdapat kehati-hatian yang berlebihan diantara negara-negara ASEAN. Ruang kompromi terlalu lebar sehingga sejumlah klausul dan komitmen liberalisasi perdagangan kandas ditengah jalan. Salah satunya terlihat pada mekanisme ala WTO yakni *Special and Differential Treatment* (SDT) pada RCEP maupun ASEAN Free Trade Area. SDT memberikan kelonggaran yang justru kontraproduktif dan menjadi sumber kebuntuan perundingan perdagangan (Gonzalez:2019). Hal tersebut bermuara pada prinsip ASEAN Way yang termanifestasi pada Tindakan non-intervensi pada negara anggota, diplomasi yang menjunjung konsultasi, pembuatan keputusan berbasis konsensus hingga terbatasnya mekanisme institusional yang mengikat (Khong & Nesadurai dalam Acharya & Johnston: 2007:17). Dengan demikian, keputusan India untuk keluar

sesungguhnya adalah realitas tidak mengejutkan. Dengan kata lain, ASEAN praktis tidak mampu menghasilkan respon yang lebih restriktif dalam bentuk sanksi atau disinsentif.

Sentralitas kepemimpinan ASEAN menunjukkan persoalan besar hingga pada titik bahwa ia adalah jargon belaka. Tidak teraktualisasi secara politis dan diplomatis. Pada derajat tertentu bahkan RCEP akan berorientasi Tiongkok-sentris akibat pengaruh Tiongkok yang semakin menguat lewat pendirian AIIB dan mega proyek BRI dan pendekatan politik Amerika Serikat dibawah Donald Trump yang lebih memilih perundingan bilateral dibanding multilateral. Kritik ini bahkan menyebut sentralitas ASEAN sebagai mitos (Acharya: 2017)

Hingga saat ini ASEAN tetap tidak mau membuat institusi permamen yang mengatur kerja sama dengan mitra dialog mereka. ASEAN pun masih terjebak dalam konsepsi ASEAN sebagai *regional leader* yang selama ini sulit diperankan oleh ASEAN karena prinsip *ASEAN Way* dan tekanan-tekanan *major power* ke kawasan.

### **Kesimpulan**

Tulisan ini menemukan bahwa mundurnya India dari negoisasi RCEP disebabkan oleh dua faktor yakni faktor aktor domestic yakni kekhawatiran para pelaku industry

India akan masuknya komoditi dari ASEAN dan Tiongkok tanpa peraturan yang ketat serta karakteritik kerja sama ASEAN yang belum lepas dari belengu *soft regionalism* dan *neoliberalism* yang selama ini menjadi praktik kerja sama regional ini. Dimana negara anggota ASEAN dan mitranya akan selalu memahami kerja sama yang memberikan keuntungan yang maksimal dan memiliki kekuasaan untuk menentukan arah dari kerja sama tersebut.

Pemahaman akan keempat konsep peran regionalisme yang ada, belum sepenuhnya bisa dipraktikkan oleh ASEAN, kondisi politik Asia yang pragmatis hanya membuka ruang kerja sama dalam kepentingan ekonomi dan bisnis sehingga perjanjian kerja sama tidak memerlukan *code of conduct* yang mengatur proses intergrasi regional secara kuat. Faktor utama adalah isu kedaulatan yang sensitif di kawasan Asia.

Kesimpulan berikutnya adalah ASEAN belum mampu untuk mengidentifikasi faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kawasan dan masih berada dalam kacamata statis. ASEAN berupaya untuk menegaskan perannya di kawasan sebagai *regional leader* dengan membuat berbagai scenario kerja sama. Akan tetapi dalam situasi politik internasional yang bersifat neoliberalisme

maka diperlukan kepekaan dan strategi yang adaptif dalam merespon politik internasional yang dinamis. Mundurnya India dari negoisasi RCEP bahkan hingga ditandatanganinya perjanjian tersebut pada 15 November 2020 serta respon ASEAN yang tetap dengan agendanya maka diperlukan kepekaan dan strategi yang tepat oleh ASEAN sebagai *regional leader* jika kerja sama ini hendak diperkuat dan diperluas.

Dengan masih adanya hambatan dari dalam ASEAN serta benturan dengan kepentingan domestik mitra ASEAN seperti India maka perluasan kerja sama yang diinginkan akan melaju dengan kecepatan yang rendah.

## Referensi

- Acharya, Amitav (2013), *The Making of Southeast Asia : International Reation of a Region*, Cornell Studies in Political Economy, Cornell University Press and ISEAS, London.
- Acharya, Amitav, Johnston, Alastair, (2007), *Crafting Cooperation: Regional International Institutions In Comparative Perspectives*, Cambridge University Press, Cambridge.
- Acharya, Amitav (2017) *The Myth of ASEAN Centrality?" Contemporary Southeast Asia: A Journal of International and Strategic Affairs*
- Harrison, Lisa. (2007). *Metode Penelitian Politik*. Jakarta: Kencana
- Chen, Y. (2016). *Asia-Pacific Regional Economic Integration : Coopetition vs Conflict . Contemporary Chinese Political Economy and Strategic Relations.*, 141-171.
- Fukunaga, Y. (2014). *ASEAN's Leadership in the Regional Comprehensive Economic Partnership . Asia & the Pacific Policy Studies*, 103-115.
- Ganapathi, M. (Vol. 14, No. 3, July–September 2019). *Act East in India's Foreign Policy: India-ASEAN. Indian Foreign Affairs Journal*, 195-206.
- Hsu, K. (2013). *The RCEP: Integrating India into the Asian. Indian Foreign Affairs Journal*, 41-51.
- Keohane, Robert O., and Joseph S. Nye.(1977). *Power and Interdependence Revisited. International Organization / Volume 41 / Issue 04 / September 1987*, pp 725 - 753
- Mitrany, D. (1948) 'The Functional Approach to World Organisation',

- International Affairs*, 24. *International Affairs* (Royal Institute of International Affairs 1944-), Vol. 24, No. 3 (Jul. , 1948), pp. 350-363
- Baylis, John, Smith, Steve, Owen, Patricia (2014). *Globalization of World Politics : An Introduction To International Relations*. Oxford, Oxford University Press.
- Mueller, L. M. (2019). ASEAN centrality under threat – the cases of RCEP and connectivity. *Journal of Contemporary East Asia Studies*, 177-198.
- Moleong, L.J. 2004. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosda karya
- Oba, M. (2019). Further development of Asian regionalism: institutional hedging in an uncertain era . *Journal of Contemporary East Asia Studies*, 125-140.
- Oba, M. (2019, November 14). *The Implications of India's Withdrawal Regional trade initiatives just got more complicated* . Retrieved from The Diplomat: <https://thediplomat.com>
- Palit, A. (2019, November 494). Domestic Politics Force India's Withdrawal from
- Sharma, J., & Varshney, S. K. (Vol.1 No. 2 March 2019). Science Diplomacy and Cooperation in Science and Technology in India. *Science Diplomacy Review*, 11-22.
- Steans, Jill, et al.(2010) *An Introduction To International Relations Theory : Perspectives and Themes*. London, Pearson Longman.
- Strange, S. (1992). States, firms and diplomacy. *International Affairs*, 68(1), 1–15.
- Wardani, R. Y. (Vol. 6, Iss. 2, Pgs. 15, 2020). India's Readiness for the Regional Comprehensive Economic Partnership. *Management and Economics Research Journal*, 1-15.
- Zhao, S. (2013). From Soft to Structured Regionalism: Building Regional Institutions in the Asia Pasific . *J Glob Policy Gov*, 145-166.
- Berger, Blake(2020) What RCEP Means For Indo-Pacific, retrieved from <https://thediplomat.com/2019/12/what-rcep-means-for-the-indo-pacific/>
- Chongkittavorn, Kavi (2020), RCEP Shouldn't Leave India Out, retrieved from <https://www.eria.org/news-and-views/rcep-talks-shouldnt-leave-india-out/>

Gonzalez, Anabel (2019), Bridging the Divide between Developed and Developing Countries in WTO Negotiations, retrieved from <https://www.piie.com/blogs/trade-investment-policy-watch/bridging-divide-between-developed-and-developing-countries-wto>

<https://www.thejakartapost.com/news/2020/08/18/rcep-enters-final-phase-to-be-signed-without-india-trade-ministry.html>

<https://economictimes.indiatimes.com/news/economy/foreign-trade/rcep-nations-offer-india-package-to-return-to-negotiating-table/articleshow/75523748.cms>

<https://data.aseanstats.org/fdi-by-hosts-and-sources>)

<https://tradedat.commerce.gov.in/eidb/Icnt.com.asp>